

**ANALISIS PENGEMBANGAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi pada *Website*, *Lumbung Data*, *Bio Sistem Online*, dan *Jateng Pintar*,
Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003)**

Oleh:

Ridhayanti Annisa Puspa, Dyah Hariani

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Electronic Government is the implementation of the use of information technology in government services to the public. Department of Education and Culture of Central Java as the institution of public service providers in the field of education began to build Electronic Government system since 2011. The existence of limited resources supporting the development of Electronic Government itself less than the maximum. The approach used is descriptive qualitative with data collection technique through interview, observation, and documentation. To assess the development of Electronic Government in the Department of Education and Culture of Central Java, used the level of development of Electronic Government starting from level 1 preparation, level 2 maturation, level 3 consolidation and level 4 utilization. In addition, to know the supporting and inhibiting factors using the successful elements of Electronic Government development support, capacity, and values. The results showed that the development of Electronic Government in the Department of Education and Culture of Central Java Province is at level 2 maturation. The development of the Electronic Government in the Department of Education and Culture of Central Java has not reached the level of 3 consolidation due to inhibiting factors of inadequate application infrastructure, the absence of Electronic Government related regulations at the service level, overlapping duties and obligations of employees, and the minimum budget of Electronic Government development. While the supporting factor is cooperation between government and private parties, the UPT Office that helps the implementation of tasks in the field of ICT, as well as training conducted regularly for employees. It is suggested to the Department of Education and Culture of Central Java to add more diverse application infrastructure, increase employees to avoid overlap, improve socialization to the public regarding Electronic Government concept, and improve financial management.

Keywords: Electronic government, infrastructure, resources, financial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan di Indonesia diwujudkan dengan adanya *electronic government*. *Electronic government* merupakan implementasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah kepada publik. Pelaksanaan pengembangan *electronic government* secara nasional berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Electronic Government. Inpres ini merupakan pedoman bagi semua instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pelaksanaan *electronic government*. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pemahaman, keterpaduan langkah dari seluruh instansi pemerintah dalam mengaplikasikan pengembangan *electronic government*.

Penerapan *electronic government* di Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013. Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki strategi perencanaan dalam membangun

pemerintahan elektronik atau *electronic government*.

Electronic government di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini mulai dibangun pada tahun 2014 dan ditargetkan selesai pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2017 dapat diaplikasikan secara menyeluruh (Metro Jateng, 25/12/15). Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa dengan sistem ini dia dapat memantau kinerja, database, jumlah dan potensi pegawai, penganggaran, lelang pengadaan barang dan jasa, hingga transaksi keuangan seluruh SKPD.

Dengan adanya penerapan *electronic government* di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Jawa Tengah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlomba-lomba untuk menerapkan sistem *electronic government* di lingkungan OPD mereka. Salah satu OPD yang mulai membangun sistem *electronic government* adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai lembaga penyedia pelayanan publik di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini pertama kali menerapkan *electronic government* pada tahun 2011 meskipun penerapannya belum secara keseluruhan.

Hal ini diawali dengan pembuatan *website* resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://www.pdkjateng.go.id/>. *Website* tersebut berfungsi untuk menyediakan pelayanan informasi publik.

Pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah belum terlepas dari permasalahan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 menyebutkan permasalahan pada kepastian dan kualitas pelayanan bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, salah satunya yaitu terkait pengembangan *electronic government*. Permasalahan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dicantumkan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Terbatasnya sumber daya aparatur pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- d. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan pendidikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti atas hasil penelitian yang ingin dipahami dan diteliti, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

C. Tinjauan Pustaka

1) Administrasi Publik

Dikutip dari Harbani Pasolong (2011:8), beberapa ahli mendefinisikan administrasi publik adalah sebagai berikut:

Dwight Waldo mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Nicholas Henry menjelaskan administrasi publik sebagai suatu

kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi publik setidaknya harus melihat enam dimensi strategis (Keban, 2014:10-11) yaitu: dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi etika, dimensi lingkungan, dimensi akuntabilitas kinerja dan dimensi manajemen.

2) Manajemen Publik

Manajemen diartikan dengan sangat variatif oleh para ahli, yang didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut. Menurut Shafritz dan Russell (Keban, 2004: 92) manajemen didefinisikan tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan tetapi juga sekelompok orang yang bertanggungjawab menjalankan proses tersebut. Donovan dan Jackson (Keban, 2004: 92) melihat manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan, dan serangkaian tugas.

Sementara itu, muncul tipe manajemen khusus yang disebut sebagai

manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific manajemen”. Akan tetapi manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “rational-instrumental” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Ott, Hyde, dan Shafritz (Keban, 2004: 92) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang saling tumpang tindih.

Berdasarkan uraian definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah proses menjalankan organisasi publik dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi publik.

3) Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen terdiri atas tiga kata yaitu sistem, data/informasi dan manajemen. Sistem Informasi Manajemen menurut Sutanta (2003:19) dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan berupa data-data, kemudian mengolahnya dan

menghasilkan keluaran berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan.

Sistem Informasi Manajemen Publik adalah sistem informasi manajemen yang disediakan dan digunakan oleh masyarakat, yaitu informasi yang disediakan untuk masyarakat, misalnya statistik resmi, peta, direktori, kamus, ensiklopedia, katalog barang dan jasa, peristiwa, standar, paten dan lain sebagainya. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai fokus dalam ilmu administrasi negara selalu mengkaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya, salah satu sumber daya yang penting adalah informasi. (Kumrotomo, 2009 :83).

SIM dalam kegiatan manajemen yang baik harus mampu memberikan dukungan pada proses-proses berikut :

- a. Proses Perencanaan
- b. Proses Pengendalian
- c. Proses Pengambilan Keputusan

4) *Electronic Government*

Menurut Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *electronic government* , menjelaskan bahwa *electronic government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *electronic government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *electronic government* sebagai berikut (Indrajit, 2004:2) *Electronic government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*

Ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2004:15)

Menurut Inpres No 3 tahun 2003, berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *electronic government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Persiapan
2. Tingkat 2 - Pematangan
3. Tingkat 3 – Pemantapan
4. Tingkat 4 - Pemanfaatan

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena/peristiwa yang ada dalam pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat Jalan Pemuda No. 134 Semarang. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengembangan *electronic government*. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode *key informan* yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sub bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Tim TIK Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Tim TIK BPTIK DIKBUD dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, BPTIK DIKBUD dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, artikel, media masa, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Pengembangan *Electronic Government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003

Pengembangan *Electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang dinilai berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

1. Penyiapan Konten dalam Pengembangan *Electronic*

Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

a. Situs Informasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki situs informasi berupa situs website resmi yaitu www.pdkjateng.go.id yang digunakan untuk mempublikasikan informasi-informasi terkait pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki aplikasi pengelola data pendidikan yaitu Bio Sistem Online, Lumbung Data, dan Jateng Pintar.

Selain website resmi www.pdkjateng.go.id, setiap UPT Dinas juga telah memiliki situs informasi sendiri. Pada masing-masing bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki situs informasi sendiri berupa e-mail yang digunakan untuk transaksi informasi seperti pengiriman laporan, pengiriman surat maupun informasi yang lain.

b. Situs Informasi Interaktif

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan interaksi dengan publik melalui sosial media seperti *Facebook*

dan *Twitter*, serta forum diskusi yang tersedia di website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun, sekarang ini yang selalu aktif digunakan hanya *Twitter*. Akun *twitter* tersebut dibuat mulai bulan November tahun 2011, sampai sekarang pengikutnya sebanyak 4.112 dan 1.255 postingan. Melalui *twitter* ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berinteraksi dengan masyarakat, misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, merespon pengaduan maupun sekedar menerima informasi dari masyarakat. Tujuannya agar masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintah dan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

c. Situs Antar Muka Keterhubungan dengan Lembaga Lain

Pada pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, situs keterhubungan dengan lembaga lain diwujudkan dengan disediakannya Tautan yang ada pada website resmi www.pdkjateng.go.id. Dalam website tersebut terdapat beberapa *Link* yang menghubungkan langsung dengan lembaga lain seperti website

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM) dan juga dengan UPT Dinas seperti BPTIK DIKBUD, BP DIKJUR, BP DIKSUS. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam menemukan informasi pendidikan yang diinginkan dalam.

d. Situs Transaksi Pelayanan Publik

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah belum memiliki situs yang digunakan untuk transaksi dalam pelayanan publiknya, mengingat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berupa satuan pendidikan, artinya pelayanan tersebut tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi melalui lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah atas.

e. Interoperabilitas Aplikasi maupun Data dengan Lembaga Lain

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah belum memiliki interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain, namun hal tersebut sudah menjadi rencana dari

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah itu sendiri yang secepatnya akan segera diwujudkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menggagas aplikasi yang dapat menghubungkan seluruh OPD di Jawa Tengah.

f. Aplikasi untuk Pelayanan yang Bersifat G2G, G2C dan G2B yang Terintegrasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini belum memiliki aplikasi yang digunakan untuk pelayanan yang terintegrasi baik dengan publik, pihak swasta maupun dengan lembaga lain. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan untuk sampai pada tahap itu. Kemampuan disini maksudnya kemampuan anggaran untuk pengadaan aplikasi, kapasitas data yang masih kurang memadai, serta kemampuan untuk mengelolanya. Selain itu, mengingat pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berupa satuan pendidikan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sendiri menganggap aplikasi pelayanan yang terintegrasi

belum menjadi kebutuhan yang pokok bagi mereka.

2. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *Electronic government* karena tanpa ada sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang IT, maka *Electronic government* tidak akan bisa diterapkan dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki personil yang khusus untuk mengelola IT yaitu Tim TIK yang terdiri dari perwakilan masing-masing bidang yang berkompeten di bidang IT kemudian dibentuk suatu tim khusus untuk mengelola bagian IT. Pembentukan Tim TIK tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/00050.a Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki unit yang bertugas untuk membantu menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan di bidang IT yaitu BPTIKP

(Badan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan). Tim TIK terdiri dari 13 personil, sedangkan tim pengelola TIK di BPTIK DIKBUD terdiri dari 19 personil.

3. Penyiapan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan *Electronic Government*

Salah satu kunci keberhasilan pengembangan *electronic government* adalah dukungan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengembangan *electronic government* itu sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan *electronic government* nya. Kondisi sarana dan prasarana tersebut dapat dikatakan cukup baik meskipun ada beberapa peralatan yang rusak karena termakan usia, tetapi secara keseluruhan selama tidak mengganggu pekerjaan maka tidak menjadi masalah yang berarti bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kebutuhan akan sarana dan prasarana bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, karena sarana dan prasarana merupakan elemen

penting dalam pengembangan *electronic government*.

4. Sosialisasi Informasi untuk Internal maupun untuk Public

Sosialisasi juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan *Electronic Government*, karena dengan adanya sosialisasi pemerintah secara khusus dan masyarakat secara umum dapat mengetahui konsep *Electronic government* yang diterapkan tersebut. Untuk mensosialisasikan situs informasi sebagai bentuk pengembangan *Electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan berbagai bentuk. Untuk lingkungan internal, sosialisasi dilakukan melalui pelatihan-pelatihan TIK yang dilakukan secara berkala. Dan untuk lingkungan eksternal yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan dilakukan dengan cara tersirat yaitu ditampilkan pada forum-forum tertentu dan juga menggunakan brosur, pamflet dan juga *multimedia learning center*. Selain itu dilaksanakan juga pelatihan TIK untuk Guru-Guru yang ada di Jawa Tengah, tujuannya agar mereka mampu menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan analisis pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Tengah, dinilai berdasarkan Tahapan Pengembangan *Electronic government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah saat ini berada pada tahap kedua yaitu Tahap Pematangan.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pengembangan *Electronic Government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

1. Support

Menurut Indrajit (2004:15), elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *Electronic Government*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elemen *support* adalah *political will* dan sosialisasi.

a) Political Will

Tujuan dari adanya penerapan *Electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah yaitu mewujudkan pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan dan tata pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, selain itu

juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga semakin meningkat.

Pengembangan *Electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada beberapa regulasi, yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *Electronic Government*, dan yang ketiga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk peraturan di lingkup dinas yang khusus mengatur pengembangan *Electronic government* memang belum ada, tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki regulasi yang mengatur tentang pembentukan Tim TIK, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyiapan SDM dalam pengembangan *Electronic government*

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

b) Sosialisasi

Menurut Indrajit (2004:16) salah satu bentuk dukungan (*support*) dari pemerintah dalam pengembangan *Electronic government* yaitu dengan disosialisasikannya konsep *Electronic government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk memperkenalkan konsep *Electronic government* kepada pemerintah maupun masyarakat melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan cara pelatihan atau bintek untuk pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan untuk guru-guru di Jawa Tengah. Bentuk sosialisasi yang kedua yaitu ditujukan untuk masyarakat melalui pamflet, brosure, *multimedia learning center*, serta media sosial.

2. Capacity

Menurut Indrajit (2004:17) yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah

adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *Electronic government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar pengembangan *Electronic government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Dalam pengembangan *Electronic Government*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim TIK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/00050.a Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yang berjumlah 13 personil. Tim TIK tersebut merupakan perwakilan dari berbagai bidang sehingga dalam pelaksanaan tugasnya terjadi *overlapping* atau tumpang tindih. Hal inilah yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja Tim TIK

dalam pengembangan *Electronic Government*.

Selain Tim TIK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki UPT Dinas yang bertugas membantu tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (BPTIK DIKBUD). Pada BPTIK DIKBUD terdapat 19 personil yang membantu Dinas dalam pengembangan *electronic government*.

b. Sumber Daya Finansial

Ketersediaan sumber daya finansial merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai inisiatif *Electronic Government*. Karena jika tidak ada sumber daya finansial yang mendukung maka pengembangan *Electronic government* tidak akan berhasil.

Sumber daya finansial dalam pengembangan *Electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari APBD. Dana tersebut dianggarkan untuk keperluan *maintenance*,

pengadaan aplikasi, pembiayaan BPTIK DIKBUD, pelaksanaan pelatihan dan bintek, peningkatan *bandwidth*, dan biaya operasional lainnya terkait TIK.

Besaran anggaran setiap tahunnya tidak selalu sama, bisa bertambah bisa juga berkurang, sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Namun, beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan anggaran dikarenakan ada pengurangan anggaran dari pusat. Hal ini menyebabkan pengembangan *Electronic government* menjadi kurang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan kerja sama dengan pihak swasta diantaranya dengan PT DINUSTEK dalam hal pengadaan aplikasi.

c. Sumber Daya Infrastruktur

Menurut Indrajit (2004:17) ketersediaan infrastruktur teknologi informasi merupakan 50% dari kunci keberhasilan pengembangan konsep *Electronic Government*. Artinya ketersediaan infrastruktur teknologi sangat berpengaruh dalam kesuksesan pengembangan *Electronic Government*.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah membangun infrastruktur sebagai pendukung pengembangan *Electronic Government*. Infrastruktur aplikasi yang telah dibangun yaitu sebagai berikut:

- a. Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (www.pdkjateng.go.id)
- b. Website UPT Dinas
- c. Aplikasi *e-office*
- d. Aplikasi Lumbung Data Pendidikan
- e. Aplikasi Jateng Pintar
- f. Aplikasi Bio-Sistem Online
- g. Akun *Twitter* @pdkjateng

Selain infrastruktur aplikasi, ada juga infrastruktur jaringan dan sarana prasarana pendukung TIK lainnya.

3. Value

Berbagai inisiatif *electronic government* tidak ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya pengembangan konsep *Electronic government* tersebut, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *Electronic government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan juga masyarakat dan mereka yang berkepentingan (Indrajit, 2004:18).

a. Manfaat *Electronic Government* Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Manfaat dari pengembangan *Electronic government* ini yang paling penting adalah meningkatnya “*trust*” atau kepercayaan publik terhadap kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi di Jawa Tengah. Selain itu juga meningkatnya manajemen tata kelola yang ada di pemerintah, sistem informasi yang lebih terukur, adanya keterbukaan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan, dalam arti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah.

b. Manfaat *Electronic government* Bagi Masyarakat

Manfaat dari pengembangan *Electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan dari adanya pengembangan *Electronic government* di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yaitu dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan khususnya di bidang pendidikan, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang diinginkan baik melalui website maupun melalui media sosial seperti *twitter*, selain itu masyarakat khususnya siswa dan guru dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yaitu aplikasi *Jateng Pintar* untuk menambah pengetahuan dan menambah bahan untuk belajar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Pengembangan *Electronic Government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003

Berdasarkan analisis pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dinilai berdasarkan Tahapan Pengembangan *electronic government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *electronic government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Jawa Tengah saat ini berada pada tahap kedua yaitu Tahap Pematangan, dimana dalam tahap tersebut berisi kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam pengembangan *electronic government* yaitu pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan pembuatan situs antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dapat dikatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria pada tahap pematangan tersebut. Dalam pengembangan *electronic government*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah belum sampai pada tahap ketiga dan keempat yaitu Tahap Pemantapan dan Tahap Pemanfaatan karena kriteria yang ada pada tahap ketiga dan keempat tersebut belum dapat terpenuhi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kriteria tersebut yaitu pembuatan situs transaksi pelayanan publik, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain, dan pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2C, G2B dan G2G yang terintegrasi.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pengembangan *Electronic*

***Government* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

Faktor pendorong dalam penerapan *Electronic Government* di Disdikbud Prov Jateng yaitu sosialisasi yang dilakukan di lingkungan internal dan eksternal, adanya UPT Dinas yang membantu tugas dalam bidang IT, adanya kerjasama dengan pihak swasta, adanya rencana pengembangan aplikasi baru.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya regulasi di tingkat Dinas, adanya *overlapping* pegawai, keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur pendukung.

B. Saran

1. Menyiapkan situs transaksi pelayanan publik tetapi yang tidak berupa uang, misalnya transaksi informasi.
2. Menyiapkan aplikasi yang dapat dioperasikan bersama dengan lembaga lain.
3. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan membuat aplikasi untuk pelayanan publik misalnya untuk pelayanan administrasi maupun pelayanan perizinan.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar menyusun peraturan atau regulasi terkait penerapan *Electronic Government* di tingkat Dinas.
5. Membentuk tim pengelola TIK yang berdiri sendiri, artinya tidak memiliki tugas di bidang lain sehingga lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
6. Perlu adanya perbaikan manajemen keuangan agar lebih baik dalam mengelola keterbatasan anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang TIK.
7. Perlu adanya peningkatan infrastruktur khususnya infrastruktur aplikasi baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Handoko, T Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Indrajit, Eko Richardus. 2004. *Electronic Government*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Indrajit, Eko Richardus; Akbar Zainudin; Dudy Rudianto. 2005. *Electronic government In Action*. Yogyakarta: ANDI
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moekijat. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju
- Moelong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syahrani & Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif*

Good Governance. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Tansparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

REGULASI

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/0050.a Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

SUMBER LAIN

Anggana, Yordan Putra. Upaya Pengembangan *Electronic government* dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

Arif, M. Syaiful. Analisis Pengembangan *Electronic government* Melalui Penyelenggaraan Website di Kabupaten Kudus.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Website Resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah www.pdkjateng.go.id

Lumbung Data Pendidikan Provinsi Jawa Tengah www.dapodik.pdkjateng.go.id

Bio-Sistem Online Pendataan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah www.data.pdkjateng.go.id

Jateng Pintar www.pintar.jatengprov.go.id

[Pemeringkatan Electronic government Indonesia \(PeGI\)](#) dalam http://pegi.layanan.go.id/download/abel_peg_i_2015/2015_PROVINSI.PNG (Diakses pada 1 Juni 2017)